BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Kompas
Subyek : Lumpur Lapindo
Edisi : 19 Juni 2008
Halaman : 22

Warga Tolak Tanggul Seluas 628 Hektar Area Terdampak Lumpur Lapindo

SIDOARJO, KOMPAS - Warga Desa Kedungbendo, Kecamatan Tanggulangin, Sidoarjo, Jawa Timur, menolak perluasan tanggul lumpur Lapindo yang akan melintasi desa mereka. Warga minta sisa pembayaran sebesar 80 persen dilunasi dulu oleh PT Minarak Lapindo Jaya sebelum rumah dan tanah mereka dibangun tanggul.

Kepala Desa Kedungbendo Hasan ketika ditemui pada Rabu (18/6) menjelaskan, saat ini ada sekitar 20 warga yang masih bertahan di rumah masing-masing. Menurut Hasan, sikap warga itu sesuai prinsip dalam transaksi, yaitu barang diberikan setelah uang dibayarkan 100 persen.

Kalau proyek perluasan tanggul sangat mendesak dan perlu segera dibangun, sebaiknya PT Minarak Lapindo Jaya (MLJ) segera melunasinya. ”Kalau tidak, warga akan tetap menolak pembangunan tersebut sampai kapan pun,” kata Hasan.

Ia mengatakan, dari 1.900 berkas tanah warga Kedungbendo yang masuk dalam peta area terdampak lumpur Lapindo, sekitar 1.700 sudah menerima pembayaran 20 persen dan masih menunggu jadwal pembayaran sisa 80 persen. Adapun sisanya, yakni sekitar 200 berkas, masih belum menerima uang pembayaran 20 persen.

Kepala Humas Badan Penanggulangan Lumpur di Sidoarjo Achmad Zulkarnain menyatakan, akibat penolakan warga, pihaknya baru bisa memulai pembangunan perluasan tanggul di Desa Ketapang, Kecamatan Tanggulangin. ”Pembangunan yang melintasi Desa Kedungbendo terpaksa ditunda dulu,” tuturnya.

Dikatakan Achmad, pembangunan tanggul Kedungbendo yang telah berjalan dua pekan merupakan rangkaian akhir dari seluruh pembangunan tanggul yang nantinya akan menutupi seluruh area terdampak lumpur Lapindo seluas 628 hektar.

Tanggul direncanakan memiliki tinggi 11 meter dengan lebar puncak tanggul 5-6 meter, lebar alas 30-42,5 meter, serta panjang sekitar 2 kilometer. Adapun luas tanggul mencapai 80 hektar.

Relokasi warga

Dalam inventarisasi Dinas Permukiman Jatim, pembangunan perumahan di wilayah Sidoarjo akan digunakan untuk warga yang direlokasi dari Siring Barat, Mindi, dan Jatirejo Barat. Sekitar 800 rumah diperlukan bagi warga desa yang tidak masuk dalam peta terdampak lumpur.

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup

Menyangkut kasus Lapindo, Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur Inspektur Jenderal Herman Sumawiredja menyatakan, pihaknya tak akan menyerahkan kembali berkas pemeriksaan kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

”Berkas sudah diperbaiki sesuai petunjuk jaksa, tetapi tetap saja dikembalikan. Jika memang enggak mau anggap berkas lengkap, kenapa harus diserahkan lagi,” paparnya. (A13/A14/BEE)

Perpustakaan Emil Salim
Kementerian Negara Lingkungan Hidup